

Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gunung Merapi: Studi Kasus di Desa Umbulharjo, Sleman

Community Preparedness Facing Mount Merapi Disaster: Case Study in Umbulharjo Village, Sleman

Happy Ade Permanasari, Sunarto

Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang rawan bencana terutama Gunung Merapi. Untuk meminimalkan korban bencana dikembangkan program kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gunung merapi melalui desa siaga. Tujuan penelitian ini mengetahui pelaksanaan kegiatan dan penerapan program kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gunung merapi di Desa Siaga Umbulharjo. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus dengan analisis kualitatif. Subjek yang diteliti adalah pelaku pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan desa siaga, sedangkan objek penelitian adalah situasi sosial dalam pelaksanaan kegiatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi nonpartisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, *member check*, dan triangulasi. Pelaksanaan kegiatan sudah baik, pembiayaan sudah cukup, pelatihan-pelatihan sudah baik, sosialisasi, sarana-sarana yang ada, kinerja kader, dan peran Puskesmas baik. Namun, keberhasilan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan tersebut belum diikuti dengan keberhasilan pelaksanaan desa siaga. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang desa siaga. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sudah baik, tetapi tidak diikuti dengan pelaksanaan desa siaga secara umum.

Kata kunci: Kesiapsiagaan, bencana gunung merapi, desa siaga

Abstract

Yogyakarta Province is a disaster-prone province, especially the mountain trim. Disaster preparedness is essential to minimize the disaster victims so formed the community program on disaster preparedness through Desa Siaga of Mount Merapi alert. To determine the activity and how the implementation of community disaster preparedness programs Mount Merapi on the implementation of Desa Siaga in the Umbulharjo Village alert This study was a descriptive study using a case study research design with qualitative analysis. Subjects in the study was the perpetrator of the community in dealing with disaster preparedness merapi mountain on implementation of desa siaga with the object of research is the social situation in the imple-

mentation of preparedness merapi mountain. Resource persons determined by the method of purposive and snowball effect if necessary. The collection of data by way of nonparticipatory observation, indepth interviews, documentation, member check, and triangulation. Implementation of the activities of disaster preparedness in the face of the mountain communities have nice views of the trim is already sufficient financing, training, training has been good from the parties involved, socialization, existing facilities, the performance of cadres, and the role of good health. The success of the implementation of disaster preparedness in the face of the mountain communities are not followed by smoothing the successful implementation of the desa siaga, seen from many people who do not know what a desa siaga. Implementation of the activities of disaster preparedness in the face of the mountain communities have a good trim but it is not followed by the implementation of desa siaga in general.

Key words: Preparedness, mount merapi disaster, desa siaga

Pendahuluan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, dan faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹ Secara umum, manajemen siklus penanggulangan bencana meliputi: 1) kejadian bencana (*impact*); 2) tanggap darurat (*emergency response*); 3) pemulihan (*recovery*); 4) pembangunan (*development*); 5) pencegahan (*prevention*); 6) mitigasi (*mitigation*); 7)

Alamat Korespondensi: Sunarto, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta, Hp. 08156898268, e-mail: narto_darsono@yahoo.com

kesiapsiagaan (*preparedness*).²

Tahun 2008, program penanganan bencana meliputi 2 bagian. Pertama, program penanganan bencana dengan mitigasi fisik dan mitigasi nonfisik.³ Penanganan bencana dengan mitigasi fisik dilakukan menggunakan alat komunikasi. Penanganan bencana sebagian besar bergantung pada pesawat *handy talky* (HT) yang menggunakan gelombang radio *very high frequency* (VHF) yang dapat bertahan dalam bencana dibanding sistem jaringan seluler. *Early Warning System* (EWS) adalah sistem peringatan dini dengan prinsip berfungsi secara efisien jika peringatan diterima oleh penduduk lebih cepat dari datangnya bahaya. EWS terdiri atas sistem pemantau, sistem kontrol, dan sistem penyampai. Jalan evakuasi adalah prasarana pengungsian yang sangat penting untuk kelancaran proses evakuasi bagi masyarakat yang terancam erupsi Merapi. Barak pengungsian dibangun untuk menampung penduduk di kawasan rawan bencana yang mengungsi secara mandiri dan yang diungsikan.⁴

Penanganan bencana dengan mitigasi nonfisik berupa geladi lapang dan kegiatan sosialisasi. Geladi lapang adalah latihan yang melibatkan aparat, masyarakat, dan sistem untuk melakukan simulasi bencana dengan kejadian yang dibuat senyata mungkin sesuai yang sebenarnya. Tujuan kegiatan sosialisasi menjelaskan ancaman bahaya akibat kejadian alam berupa erupsi Merapi disertai awan panas yang dapat membahayakan jiwa masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan rawan bencana serta cara menghindari dari ancaman bahaya tersebut.

Secara geologis, daerah Yogyakarta terletak pada cekungan yang sudah terisi oleh material vulkanik gunung api. Sebelah utara Yogyakarta dibatasi oleh Gunung Merapi yang kadang kala menunjukkan aktivitas sebagai akibat dari munculnya magma melalui lubang kepundan. Bagian selatan Yogyakarta dibatasi dengan aktivitas zona subduksi yang hingga saat ini menunjukkan aktivitas yang ditandai dengan gempa-gempa mikro di sekitar zona tersebut.⁵ Gunung Merapi ini masih dianggap sebagai gunung berapi yang aktif dan berbahaya di Indonesia.⁶ Untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang besar dalam bencana maka perlu ada pengelolaan tanggap bencana serta rekonstruksi atau rehabilitasi pascabencana. Dalam hal ini, sebuah desa sangat berperan penting dalam mewujudkan hal tersebut sehingga perlu adanya desa siaga.

Desa siaga yang diterapkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah desa atau kelurahan dengan penduduk yang mempunyai kesiapan sumber daya serta kemampuan dan kemauan mencegah dan mengatasi masalah/ancaman kesehatan, bencana, dan kedaruratan secara mandiri.⁷ Desa siaga dibedakan menjadi 3 jenis untuk mempermudah strategi intervensi

terhadap sasaran pengembangan meliputi semua individu dan keluarga di desa/kelurahan, tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, dan sarana.⁸

Metode

Desain penelitian adalah studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono,⁹ penelitian kualitatif tersebut tidak menggunakan istilah populasi tetapi "*social situation*" yang terdiri dari: tempat, pelaku, dan aktivitas. Penelitian dilakukan di desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Pelaku meliputi masyarakat setempat, tokoh masyarakat, kader, bidan, Kepala Desa Umbulharjo, dan perangkat desa. Aktivitas yang diteliti adalah pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gunung merapi terhadap pelaksanaan desa siaga.

Peneliti mengumpulkan data dengan terlebih dahulu melakukan observasi, dilanjutkan dengan *indepth interview* untuk mengumpulkan data primer melalui daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan terbuka terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, kader, bidan, dan Kepala Desa Umbulharjo. Semua wawancara direkam menggunakan *tape recorder*. Peneliti juga menggunakan kamera untuk dokumentasi serta buku catatan. Informasi yang dikumpulkan pada *triangulasi* dengan *member check* kepada seluruh responden. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran dokumen untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program pelatihan menghadapi bencana gunung merapi terhadap pelaksanaan desa siaga. Dalam penelitian ini, aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga tuntas.

Hasil

Desa Umbulharjo, salah satu desa di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY merupakan desa yang paling dekat dengan puncak Merapi di Kabupaten Sleman. Luas wilayah Desa Umbulharjo adalah 826 Ha. Wilayah Desa Umbulharjo sebelah utara berbatasan dengan kehutanan/Gunung Merapi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Wakir Sari dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kepuharjo.

Terkait dengan pemahaman desa siaga ternyata responden tidak mengetahui desa siaga, tetapi mereka dapat menyimpulkan arti dari desa siaga. Masyarakat tidak tahu tentang desa siaga, tetapi masyarakat hanya tahu tentang kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas dari bidan desa ataupun kader, seperti kegiatan posyandu yang diadakan tiap bulan, pengetahuan tentang gizi serta kesehatan ibu dan anak.

"...ya karena di sini belum ada koordinasi atau

...mungkin sudah ada tapi saya ga. Jadi desa siaga itu suatu desa dimana yaitu udah dibuat oleh pemerintah untuk siaga, jadi pemerintah itu udah ngasih semacam pendidikan, pelatihan, ketrampilan sama masyarakat di dalamnya untuk cepat tanggap menghadapi berbagai situasi.”(R7, 24-31)

“...di sini diadakan posyandu tiap bulannya mbak, tiap tanggal 13 pastinya tapi kalau tidak ada halangan lho mbak, disitu itu kegiatannya kesehatan ibu dan anak, timbangan, penyuluhan tentang gizi...terus anu, tentang kebersihan juga diberikan gitu lah mbak...”(R5, dikutip dari cerita R5)

Pelaksanaan desa siaga membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan biaya. Biaya yang digunakan berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah melalui dinas kesehatan (Lihat Tabel 1).

“...kita dapet dana dari pemerintah ya. kita lewatnya itu dari dinas kesehatan itu, kita dapat tiap puskesmas terus ketempat kita di desa...terus yang kedua itu dari dinas langsung ke kita, jadi bidan desa atas nama desa siaga itu kita punya nomor rekening sendiri.”(R4, 117-123)

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang meliputi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Gunung Merapi dan kegiatan desa siaga lainnya seperti perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Keluarga Sadar Gizi (KADARZI), dan sebagainya. Dukungan dalam pelaksanaan program desa siaga juga diperoleh dari masyarakat, baik dari instansi terkait seperti kepala desa, puskesmas, tokoh masyarakat, serta masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan narasumber:

“...dari pemerintah ya sudah mendukung, masyarakat juga sudah mendukung...masyarakat kalau diberi materi-materi itu senang mba...kader-kadernya juga mendukung, dari puskesmas mendukung, semua juga mendukung mbak.”(R3, 126-132)

Menurut responden, kegiatan desa siaga meliputi pengamatan malaria, diare, ibu hamil, persalinan, kesehatan ibu dan anak, penanggulangan kedaruratan bencana, posyandu, pengamatan penyakit, cara hidup bersih, dan kesehatan lingkungan. Dalam pelaksanaan desa siaga terlebih dahulu diedarkan *check list* tentang masalah kesehatan yang ada di desa. *Check list* tersebut diberikan kepada masyarakat untuk diisi. Sebelumnya diberikan pengarahan tentang cara mengisi *check list* tersebut. Setelah diisi, *check list* diolah bersama bidan desa dan kader-kader posyandu untuk melihat masalah-masalah yang muncul. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh bidan desa dan kader-kader posyandu. Sosialisasi yang dilakukan untuk pelaksanaan desa siaga tidak terlepas dari dukungan masyarakat, perangkat desa, kader, bidan desa, dan tokoh masyarakat. Responden mengatakan:

“...melalui kecamatan, dari kecamatan itu nanti alurnya ke kepala desa terus ke tokoh masyarakatnya, terus ke masyarakat, ke puskesmas...terus dari desa mengadakan kerja sama, tokoh masyarakatnya nanti diundang, ini ada desa siaga...terus dari tokoh masyarakat itu nanti yang nyebarin ke dusun-dusun, ke masyarakatnya...”(R4, 105-114)

Sosialisasi desa siaga telah dilakukan dengan diadakan pertemuan di tingkat desa yang mengundang seluruh komponen masyarakat yang diteruskan dengan sosialisasi di tingkat dusun oleh kader dan bidan desa. Desa siaga ini dilaksanakan dengan dukungan dari masyarakat, kader, bidan, puskesmas, dan *stakeholder*.

“...saya sendiri mbak he...selaku bidan desa disini, terus ada kader-kader yang ada di desa, perangkat desa, dukuh-dukuhnya, tokoh masyarakat, pak lurah, ya semuanya terlibat di situ, masyarakat juga terlibat.”(R4, 88-93)

Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gunung Merapi

Sebagian besar responden sudah mengetahui tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya bencana Gunung Merapi. Intinya adalah masyarakat tahu dan sigap menghadapi bencana yang akan maupun sedang terjadi.

“...kita menyiagakan masyarakat dengan memberikan mereka pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan mitigasi bencana, terus kita juga menyiagakan masyarakat dengan relawan-relawan.”(R2, 19-23)

Biaya yang digunakan tidak hanya berasal dari pemerintah tetapi juga dari sumber-sumber lain (Lihat Tabel 2).

“...dana pelaksanaan ini biasanya dari dinkes terus tar dikasih ke puskesmasnya mbak atau langsung kekadernya...dari dana itu ya mbak diberikan ke kepala dusun gitu, kalau tidak ya dari arisan yang diadakan tiap bulan mbak, nah dananya itu ya buat macem-macem, buat pelatihan-pelatihan...”(R4, dikutip dari cerita R4)

Dukungan dalam pelaksanaan program kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Gunung Merapi juga didapatkan dari masyarakat, instansi terkait, puskesmas, dari tokoh masyarakat serta masyarakat sendiri. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan responden:

“...masyarakat, ada RT, dari RW juga, kepala dukuh, sampai yang tingkat tertingginya itu apa sih...ehm...kepala desa, pemerintah ya untuk masalah pembiayaan gitu, kalau masyarakat ya tenaganya, kerjaannya gitu mba.”(R7, 65-70)

Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan desa siaga lainnya. Responden

Tabel 1. Sumber Biaya

Jenis Sumber Biaya	Alokasi Biaya
Pemerintah pusat	Diberikan ke dinas kesehatan kemudian disalurkan ke puskesmas
Pemerintah melalui dinas kesehatan	Diberikan langsung ke bidan desa

Tabel 2. Sumber Biaya

Jenis Sumber Biaya	Alokasi Biaya
Pemerintah melalui dinas kesehatan	Diberikan kepada puskesmas atau kader kemudian diteruskan ke dusun, dana ini diberikan sekali dalam setahun
Bantuan pemerintah desa	Diberikan jika ada acara yang berkaitan dengan program desa
Swadaya masyarakat	Masyarakat turut memberikan iuran rutin seperti arisan

sudah mengetahui kegiatan yang ada.

“...kegiatannya?ehm...kita kan sering ada pelatihan-pelatihan baik dari organisasi sendiri kan tentunya sudah ada pelatihan-pelatihan, dari desa juga sering bersama dengan bidan desa, kader-kader ada pelatihan-pelatihan dan simulasi-simulasi untuk masyarakatnya, kalau memang betul-betul terjadi bencana, dari masyarakat itu sendiri tahu bagaimana dia menghadapi, bagaimana meminimalkan resiko...”(R2, 32-41)

Koordinasi yang terjadi antara masyarakat, kader, bidan, puskesmas, dan *stakeholder* lainnya berjalan dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh responden sebagai berikut:

“...masyarakat, ada RT, dari RW juga, kepala dukuh, sampai yang tingkat tertingginya itu apa sih...ehm...kepala desa, pemerintah ya untuk masalah pembiayaan gitu, kalau masyarakat ya tenaganya, kerjanya gitu mba.”(R7, 65-70)

Sosialisasi yang dilakukan untuk program kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Gunung Merapi dalam desa siaga tidak terlepas dari dukungan masyarakat, perangkat desa, kader, bidan desa, dan tokoh masyarakat. Responden mengatakan:

“...kalau yang bencana cenderung langsung, ketika ada program kita arahkan kesana, untuk jika ada informasi-informasi kita menyampaikan melalui perangkat-perangkat yang ada disana, ada RT, ada RW, ada Dukuh, semuanya dilibatkan.”(R2, 97-102)

Sosialisasi program kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gunung merapi dalam desa siaga sudah dilakukan berbagai upaya sosialisasi, antara lain dengan diadakan pertemuan di tingkat desa yang mengundang seluruh komponen masyarakat yang akan kembali ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi di tingkat dusun oleh kader dan bidan desa. Sarana komunikasi yang digunakan di Desa Umbulharjo untuk

komunikasi pada saat bencana antara lain menggunakan HT, *megaphone* atau alat yang paling sederhana seperti kentungan.

“...kalau ada bencana kita beri tahu dengan alat komunikasi seperti megaphone, kentungan, HT, terus diadakan ronda tiap malam untuk berjaga-jaga barang kali ada apa-apa..”(R5, 28-33)

Masyarakat sudah mengetahui dan siap siaga jika ada pemberitahuan melalui *megaphone* atau kentungan. Sebelum memberitahu masyarakat, dilakukan pengamatan terlebih dahulu jika ada awan panas atau lahar dingin. Pengamatan atau pemantauan tersebut menggunakan alat pengamatan EWS. Sistem penyampai adalah sejumlah sirine di pemukiman masyarakat rawan bencana.

“...di sini tuh ya mbak, kalau ada peringatan awan panas atau abu-abu itu yang panas, sirinanya pasti bunyi mbak...nanti kita langsung mengevakuasi warga ke bawah, yang pertama itu ke pertigaan Kaliadem itu lho mbak...nanti di atas ada yang ngamatin awan panasnya, terus laharnya alirannya sampai mana, nah nanti kalau laharnya udah mau ke Kaliadem, kita dikasih tahu pakai HT, nanti kita evakuasi lagi warganya ke desa oangukrejo yang lebih ke bawah, pokoknya gitu mbak, kalau ada pemberitahuan lagi kita turun ke bawah lagi...”(R6, dikutip dari cerita R6)

Jalan evakuasi telah diperbaiki pada masa praevakuasi.

“...kalau barak tiap ada bencana langsung terkoordinir dimana pusat bencana...”(R3, 227-229)

Dalam pelaksanaan program kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Gunung Merapi membutuhkan masukan dan saran agar nantinya dapat berjalan lebih baik. Beberapa saran yang diberikan responden antara lain dukungan bidan desa siaga perlu meningkatkan koordinasi serta bidan desa yang perlu di-



Gambar 1. Barak Pengungsian

tambah. Responden menyampaikan saran tentang pelaksanaan program kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Gunung Merapi dalam desa siaga.

"...itu lho mba, desa siaga ini kan kebanyakan saya yang koordinir, jadi saya keteteran gitu mbak, pengennya sih ada yang bantu saya ngurusin ini mbak, bidan di desa ini cuma satu sih ya mbak jadi susah he..."(R4, dikutip dari cerita R4)

"...insya Allah masyarakat di sini cepat tanggap kalau ada tanda-tanda bahaya, di sini juga ada barak-barak dadakan, ya baguslah mbak selama saya di sini masyarakatnya cepat tanggap..."(R7, 146-147)

Pembahasan

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya, kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan desa sehat.² Setelah ditanyakan pemahaman responden mengenai arti desa siaga ternyata responden tidak mengetahui arti desa siaga. Akan tetapi, pernyataan responden sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh desa siaga yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.¹⁰

Pelaksanaan desa siaga membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan biaya. Biaya yang digunakan berasal dari pemerintah saja karena biaya dari pemerintah sudah mencukupi kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Pembiayaan di Desa Umbulharjo terbilang cukup baik, terlihat pada kecukupan kebutuhan dana setiap tahun. Setiap tahun didapatkan hampir Rp. 5.000.000,- dan sampai bulan Juli tahun 2010 belum habis terpakai. Namun, koordinasi masih kurang baik karena belum ada perincian anggaran. Uang yang belum terpakai hanya

disimpan untuk kegiatan selanjutnya tanpa ada pelaporan anggaran yang baik.

Peneliti mengamati bahwa dukungan masyarakat juga sangat baik dengan sering mengikuti kegiatan posyandu, berperan aktif dalam kegiatan serta bekerja sama dengan kader dalam memberikan informasi untuk pendataan. Walaupun masyarakat mendukung, masyarakat tidak tahu bahwa program-program kesehatan yang pernah dijalani adalah program dari desa siaga. Responden sudah mengetahui kegiatan desa siaga yang ada.

Sosialisasi desa siaga tampaknya sudah baik, terlihat dilakukan berbagai upaya sosialisasi antara lain dengan diadakan pertemuan di tingkat desa yang mengundang seluruh komponen masyarakat yang diteruskan dengan sosialisasi di tingkat dusun oleh kader dan bidan desa. Koordinasi desa siaga antara masyarakat, kader, bidan, puskesmas, dan *stakeholder* lainnya berjalan dengan baik.

Koordinasi di Desa Umbulharjo sudah cukup baik. Pernyataan responden di atas sesuai dengan sasaran pengembangan desa siaga oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI).⁸ Sasaran pengembangan desa siaga meliputi semua individu dan keluarga, tokoh masyarakat, pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, dan sarana.

Masyarakat sudah tahu dan sigap menghadapi bencana yang akan maupun sedang terjadi. Hal ini hampir sama dengan konsep kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana oleh Kementerian Kesehatan RI, yaitu masyarakat yang mampu mengenali, mengurangi, mencegah, dan menanggulangi keadaan darurat sehari-hari dan bencana serta faktor-faktor yang dapat menimbulkan keadaan tersebut.¹⁰

Berdasarkan pengamatan peneliti, dukungan masyarakat juga sangat baik. Hal ini terlihat dari masyarakat yang mau dididik dan dilatih, sering mengikuti kegiatan posyandu, berperan aktif dalam kegiatan serta bekerja sama dengan kader dalam memberikan informasi. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Gunung Merapi ini sudah baik karena responden sudah mengetahui kegiatan yang ada di desa Umbulharjo, simulasi-simulasi bencana alam, pelatihan kegawatdaruratan, latihan gabungan dengan puskesmas, tim *Search and Rescue* (SAR), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernyataan ini sama halnya dengan manajemen kesiapan bencana (pada tahap kesiapsiagaan) yang terdiri dari beberapa kegiatan pokok, yaitu: 1) pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); 2) pengembangan sumber daya manusia; 3) pengembangan subsistem komunikasi; 4) pengembangan subsistem transportasi; 5) latihan-

latihan gabungan; dan (6) kerja sama lintas sektor.¹¹

Koordinasi yang dilakukan di Desa Umbulharjo sudah cukup baik karena dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Gunung Merapi ini bekerja sama dengan semua elemen yang ada seperti bidan desa, kader, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep Kementerian Kesehatan RI yaitu sasaran dalam pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi bencana Gunung Merapi dalam desa siaga adalah semua individu dan keluarga, pihak-pihak yang mempunyai pengaruh, seperti tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan, dana, tenaga, dan saran.⁸

Sosialisasi program kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Gunung Merapi dalam desa siaga sudah baik, terlihat dari sudah dilakukan berbagai upaya sosialisasi antara lain dengan diadakan pertemuan di tingkat desa yang mengundang seluruh komponen masyarakat yang akan kembali ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi di tingkat dusun oleh kader dan bidan desa. Sarana komunikasi yang digunakan di Desa Umbulharjo untuk komunikasi pada saat bencana ada beberapa, misalnya dengan menggunakan HT, *megaphone* atau alat yang paling sederhana seperti kentungan. Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 menyatakan bahwa alat komunikasi selama penanganan bencana sebagian besar bergantung pada pesawat HT dengan menggunakan gelombang radio VHF.³

Pemberitahuan melalui *megaphone* atau kentungan merupakan simbol bagi masyarakat agar mereka siap siaga. Sebelum memberitahu masyarakat, dilakukan pengamatan terlebih dahulu jika ada awan panas atau lahar dingin. Pengamatan atau pemantauan tersebut menggunakan alat pengamatan EWS. EWS ini digunakan untuk memonitor gejala alam yang menuju kondisi kebencanaan dengan sistem kontrol yang mengolah data pantauan dan memutuskan tingkat bahaya.⁴

Jalan evakuasi adalah prasarana pengungsian yang sangat penting untuk kelancaran proses evakuasi bagi masyarakat yang terancam erupsi Merapi. Kondisi jalan evakuasi telah diperbaiki pada masa praevakuasi.³ Barak pengungsian dibangun untuk menampung penduduk di kawasan rawan bencana yang mengungsi secara mandiri dan yang diungsikan.³

Beberapa saran dari responden antara lain perlu peningkatan dukungan bidan desa. Koordinasi dengan bidan desa perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program desa siaga dapat berjalan dengan baik. Tanggapan responden tentang pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Gunung Merapi sudah cukup baik karena masyarakat cepat tanggap dan siap siaga jika terjadi bencana Gunung Merapi.

Pernyataan tersebut sama dengan fase kesiapsiagaan, masyarakat dan aparat pemerintah disiapkan untuk siaga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.¹² Semua responden menyambut baik program kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana Gunung Merapi dalam desa siaga karena masyarakat dapat mengetahui penanganan atau menanggulangi bencana, mengetahui cara pertolongan pertama, dan meningkatkan kualitas kesehatan mereka.

Kesimpulan

Pengetahuan tentang desa siaga belum terlalu baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui desa siaga. Namun mereka mengikuti program-program desa siaga yang diberikan oleh puskesmas, posyandu, bidan desa, dan kader. Pengetahuan tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Gunung Merapi sudah baik. Dukungan pelaksanaan desa siaga belum terlalu baik. Pembiayaan sudah mencukupi namun belum terkoordinasi dengan baik. Dukungan dalam pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya Gunung Merapi sudah baik. Dilihat dari pembiayaan yang sudah mencukupi, pelatihan-pelatihan sudah baik dan mendapat dukungan dari semua *stakeholder*, pemerintah, relawan, dan masyarakat. Masyarakat menyambut baik adanya kesiapsiagaan desa siaga dalam menghadapi bencana, khususnya bencana Gunung Merapi. Masyarakat dapat mengetahui penanganan atau menanggulangi bencana, mengetahui cara pertolongan pertama, dan meningkatkan kualitas kesehatan mereka.

Saran

Perlu adanya penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentang desa siaga oleh pemerintah, bidan desa, dan kader-kader. Perlu ada koordinasi keuangan dengan baik agar pendanaan dapat terinci. Perlu ada penambahan bidan desa agar pelaksanaan kegiatan program desa siaga berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 2007 [diakses tanggal 19 Maret 2010]. Diunduh dari: <http://www.indonesia.go.id>.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman puskesmas dalam penanggulangan bencana. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat; 2006.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Kesiapsiagaan bencana. Sleman: Bidang Pekerjaan Bawah Air Dinas Perkumpulan Petani Pemakai Air; 2008.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Manajemen Bencana. Sleman: Bidang Pekerjaan Bawah Air Dinas Perkumpulan Petani Pemakai Air; 2008.

5. Haifani A. Manajemen risiko bencana gempa bumi (studi kasus gempa bumi Yogyakarta 27 mei 2006). Yogyakarta: Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Keselamatan, Instalasi, dan Bahan Nuklir; 2008.
6. Anonim. Sejarah geologis gunung merapi. 2006 [diakses tanggal 13 Maret 2010]. Diunduh dari: <http://elcom.umy.ac.id/content/view/92/43>.
7. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buku I: petunjuk teknis desa siaga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2008.
8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku paket pelatihan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam pengembangan desa siaga. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2007.
9. Sugiyono. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2008.
10. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pengembangan desa siaga. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2006.
11. Zuhriyatin Y. Peran perawat puskesmas pada tahap kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Sleman Yogyakarta [skripsi]. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada; 2009.
12. Medical Emergency Rescue Committee. Basic on emergency. Jakarta: MER-C Training Center; 2007.